

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, 2020, "*Hukum Konstitusi : Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*", UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2010, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta.
- Ani Purwati, 2020, "*Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*", CV Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Ansori, 2016, "*Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi*", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Th.1 No.1.
- Bambang Rustanto, 2015, "*Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2020, "*Demokrasi Desentralistik Dalam Belenggu Bikameral Semu*", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Daeng S., 2015, "*Konsep Birokrasi*", FISIP Unpad, Bandung.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, "*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*", Kencana, Jakarta.
- Feri Amsari, 2014, "*Perubahan UUD 1945 : Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 2013, "*Teori dan Hukum Konstitusi*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, "*Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*", Sinar Grafika, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*", Kencana, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2017, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.

- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, "*Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Prenamedia Group, Depok.
- Jonaedi Efendi, 2016, "*Kamus Istilah Hukum Populer Cetakan I*", Kencana, Jakarta.
- K.C. Wheare, 2018, "*Konstitusi-Konstitusi Modern*", Nusa Media, Bandung.
- Marwan Mas, 2018, "*Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*", Rajawali Press, Depok.
- Max Boli Sabon, 2017, "*Ilmu Negara Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*", Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2007, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, "*Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*", Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, "*Ilmu Negara*", Rajawali Press, Jakarta.
- Nur Yanto, 2017, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahata dan Melkisedek, 2018, "*Dinamika Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*", Cempaka Putih, Klaten.
- Titik Triwulan, 2010, "*Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945 Cetakan Ke-1*", Kencana, Jakarta.
- Tri Dwi Sulisworo dkk, 2012, "*Bahan Ajar : Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*", Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional.
- Widodo Ekatjahjana, 2015, "*Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi : Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Jember University Press, Jember.
- Winarno, 2017, "*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Cetakan-6*", PT Bumi Aksara, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

### **Jurnal**

Adrianus Bawamenewi, 2019, "*Implementasi Hak Politik Warga Negara*", Jurnal Warta Edisi 61.

Amir M, "*Konsep Netralitas Terhadap Ketentuan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara*", Jurnal Petitum Vol. 6 Nomor 2.

Chaerul Shaleh, 2023, "*Hak Politik Warga Negara dan Pemilu*", 'Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol. I No.I.

Daniel Nicolas Gimon, 2018, "*Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi*", Lex Administratum Vol.VI No.4.

Djoharis Lubis, dkk., 2020, "*Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19 : Apakah Menghasilkan Kepemimpinan Yang Efektif Berbasis Multikultur?*", Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 42.

Elim Riedel C.P, 2018, "*Tanggungjawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya*", Lex Administratum Vol. VI No. 4.

Erry Gusman, 2019, "*Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia*", Ensiklopedia of Journal Vol.1 No.2 Edisi 2.

Fahmi K., 2018, "*Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*", Jurnal Konstitusi Vol. 14 Nomor 4.

- Irvan Ansyari dan Rido Putra, 2022, "*Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah*", Ijtihad Vol. 38 Nomor 1.
- Mardian Wibowo, 2015, "*Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang*", Jurnal Konstitusi Vol. 12 Nomor 2.
- Mohammad Mahrus Ali, 2015, "*Konstitusionalitas dan Legalitas Norma Dalam pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*", Jurnal Konstitusi Vol. 12 Nomor 1.
- Muh. Sabaruddin Sinapoy dan Safril Sofwan Sanib, 2019, "*Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu : Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*", Holrev Vol.3 No.2.
- Nuraida Mokhsen, Septiana Dwiputrianti dan Syaugi Muhammad, 2018, "*Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)*", Komisi Aparatur Sipil Negara Vol. 1 No. 1.
- Ramot Jhon Ericson, 2022, "*Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah*", Jurnal Hukum Positum Vol.7 No.1,
- Sipghotulloh Mujaddidi, 2021, "*Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Constitutionality of Human Right Limitation on Constitutional Court Decisions)*", Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 3, Yogyakarta.
- Sutrisno, Dwi Haryadi & Jean Darc N., 2020, "*Additional Punishment For Revocation of Political Rights to Corruption Prisoners in The Purpose of Punishment In Indonesia*", IJCLS Indones J Crim Law Stud.
- Yogi Zul Fadhli, 2016, "*Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Warga Negara*", Jurnal Konstitusi Vol.13 No.4.

### Website

- BBKPP Jogja, "*Bentuk-Bentuk Benturan Kepentingan*", <https://shorturl.at/feFPT>, tanggal akses 19 September 2023.
- KBBI Online, <https://kbbi.web.id/konstitusional> , diakses tanggal 20 Juli 2023.

PMK, “*Buku Saku Kode Etik & Kode Perilaku*”, <https://shorturl.at/qruXQ> , tanggal akses 19 September 2023.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, “*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*”, Jakarta.

Suharyono S. Hadinagoro, “Reduksi Ego Sektoral dan Perkuat Sinergi Demi Produktivitas Nasional”, <https://www.perpusnas.go.id/berita/reduksi-ego-sektoral-dan-perkuat-sinergi--demi-produktivitas-nasional-> tanggal akses 9 September 2023.

Tim, “*Ati Kata Hak – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*”, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 17.10 WIB.

Tim Mahkamah Konstitusi, “*Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 1945*”, <https://rb.gy/2lqsm>, Situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 17.02 WIB.

